



Risma Umar/Marhaini Nasution/Puspa Dewy

Ketika Proyek Energi Masuk Kedalam Kehidupan Kami ...

- ringkasan eksekutif kompilasi testimoni
perempuan -



Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam penurunan gas rumah kaca global, yaitu menetapkan kontribusi nasional (*National Determined Contribution/NDC*) menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% secara sukarela atas biaya sendiri atau 41% secara terikat dengan adanya pembiayaan internasional. Rencana Aksi Nasional untuk Menurunkan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) meliputi kenaikan porsi energi terbarukan paling sedikit 23% di tahun 2025 dan paling sedikit 31% di tahun 2050. Sayangnya, komitmen yang akan mengarahkan ekonomi nasional menuju jalan rendah karbon dan rencana-rencana aksinya, tidak pernah didiskusikan dan dikonsultasikan dengan masyarakat Indonesia.

Kumpulan testimoni perempuan yang hidup di wilayah beberapa proyek energi ini disusun untuk memperlihatkan kepada para pengambil keputusan bahwa keputusan yang dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat, terutama perempuan, hanya akan menambah beban masalah kepada masyarakat yang memang sudah terdampak perubahan iklim dan pembangunan yang salah.

Kisah mereka yang mewakili banyak kisah perempuan lain yang tak muncul, harus dianggap serius sebagai pembelajaran untuk melibatkan perempuan, komunitas dan masyarakat dalam pengambilan keputusan menghadapi perubahan iklim dalam perspektif berbeda; bukan perspektif pasar, investasi dan teknologi masif yang ada; serta menemukan solusi dan alternatif yang mengacu pada pengalaman dan pandangan masyarakat, termasuk perempuan.

November 2020

Risma Umar/Marhaini Nasution/Puspa Dewy
Aksi! for gender, social and ecological justice

Kisah-kisah perempuan dengan proyek-proyek energi dikumpulkan melalui *Feminist Participatory Action Research/ FPAR* (Penelitian Aksi Partisipatif Feminis). FPAR bukan hanya tentang penelitian, juga merupakan sarana pengorganisasian dan pembangunan gerakan lewat metode yang mendukung dan menumbuhkan gerakan perempuan. Dengan demikian mereka memahami dan berkomitmen memperjuangkan hak asasi perempuan, lingkungan, dan dalam hal ini khususnya tindakan respons iklim, politik energi dan proyek energi. Pemberdayaan perempuan akar rumput akan mengarah pada penguatan tata kelola masyarakat adat dan komunitas lokal, menantang pelaku deforestasi, perampasan tanah dan perebutan sumberdaya, serta penguatan ruang masyarakat sipil. FPAR menciptakan bentuk-bentuk baru hubungan kolaboratif untuk memberdayakan perempuan, memperkuat suara mereka, memberanikan mereka untuk menjadi bagian dari advokasi berbasis bukti dan sebagai pengambilan keputusan kebijakan.

FPAR tentang Perempuan dan Energi dikembangkan Aksi!. Pada awalnya melatih 12 fasilitator dari wilayah proyek energi.



Tim Aksi! dan fasilitator untuk FPAR Perempuan dan Energi

Mereka selama ini telah bekerja bersama perempuan akar rumput yang hidup di sekitar wilayah proyek energi.

FPAR ini dilakukan dari Februari sampai September 2020, melibatkan 82 perempuan akar rumput dari 11 desa di 6 lokasi proyek energi.

Kompilasi testimoni perempuan ini berasal dari 5 lokasi proyek, yaitu:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah

2. Bendungan Poso Energy, in Poso, Sulawesi tengah

3. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tolo 1 di Jenepono, Sulawesi Selatan

4. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal di Pulau Samosir, Danau Toba di Sumatra Utara

5. Bendungan dan Cadangan Air di Kedung Ombo, Jawa Tengah

Polusi Lumpur masuk ke mata air dan sungai di wilayah kaki Gunung Slamet di Jawa Tengah akibat kegiatan eksplorasi geothermal

Informasi Proyek	
Nama	Baturraden Geothermal Working Area (GWA)
Lokasi	Wilayah kerja proyek ini meliputi Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (5 kabupaten), lokasi di lereng Gunung Slamet yang 90% merupakan Kawasan Hutan Lindung
Luasan WKP	24.660 hektar
Perizinan	Izin Panas Bumi (IPB) - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4577k/30/MEM/2015
Pelaksana Proyek	PT. Sejahtera Alam Energy (PT. SAE)
Pembiayaan	880 juta US Dollar
Kapasitas	220 Mega Watt
Status	Eksplorasi dan pembangunan infrastruktur (sejak 2016). Eksplorasi pertama dengan menggali sumur sedalam 1,1 km dan eksplorasi kedua dengan menggali sumur sedalam 3,5 km, tidak menemukan energi panas. Sekarang sedang menunggu izin untuk eksplorasi ketiga.

Kehidupan masyarakat di kaki Gunung Slamet

Mata pencaharian masyarakat di desa Panembangdan dan Kalisari adalah dari beternak dan bercocok tanam ikan dan ulat sutera, padi sawah, dan produksi tahu. Mata pencaharian mereka sangat bergantung pada mata air di Gunung Slamet (ketinggian 3.428 m) yang mengalir melalui Sungai Prukut sebagai salah satu sungai utama, serta banyak sungai kecil lainnya. Industri rumah tangga tahu misalnya, sangat mengandalkan air bersih; sebagian besar pekerjaannya adalah perempuan.

Masyarakat juga menggunakan air dari Gunung Slamet untuk kebutuhan sehari-hari keluarga seperti untuk minum, memasak, mencuci, dan mandi. Selain sebagai sumber air, Sungai Prukut juga menjadi sumber ikan sungai, dan ulat sutera untuk pakan ikan di kolamnya. Selain itu, sungai merupakan tempat bersosialisasi bagi perempuan sambil mencuci pakaian dan tempat bermain bagi anak-anak.

Program FPAR diikuti oleh 16 perempuan akar rumput dari 2 desa, Panembangan dan Kalisari, di kaki Gunung Slamet, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Kedua desa tersebut pada tahun 2016-2017 terkena dampak langsung dari kegiatan eksplorasi dan pembangunan infrastruktur PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Baturraden. Dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari tahun-tahun tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

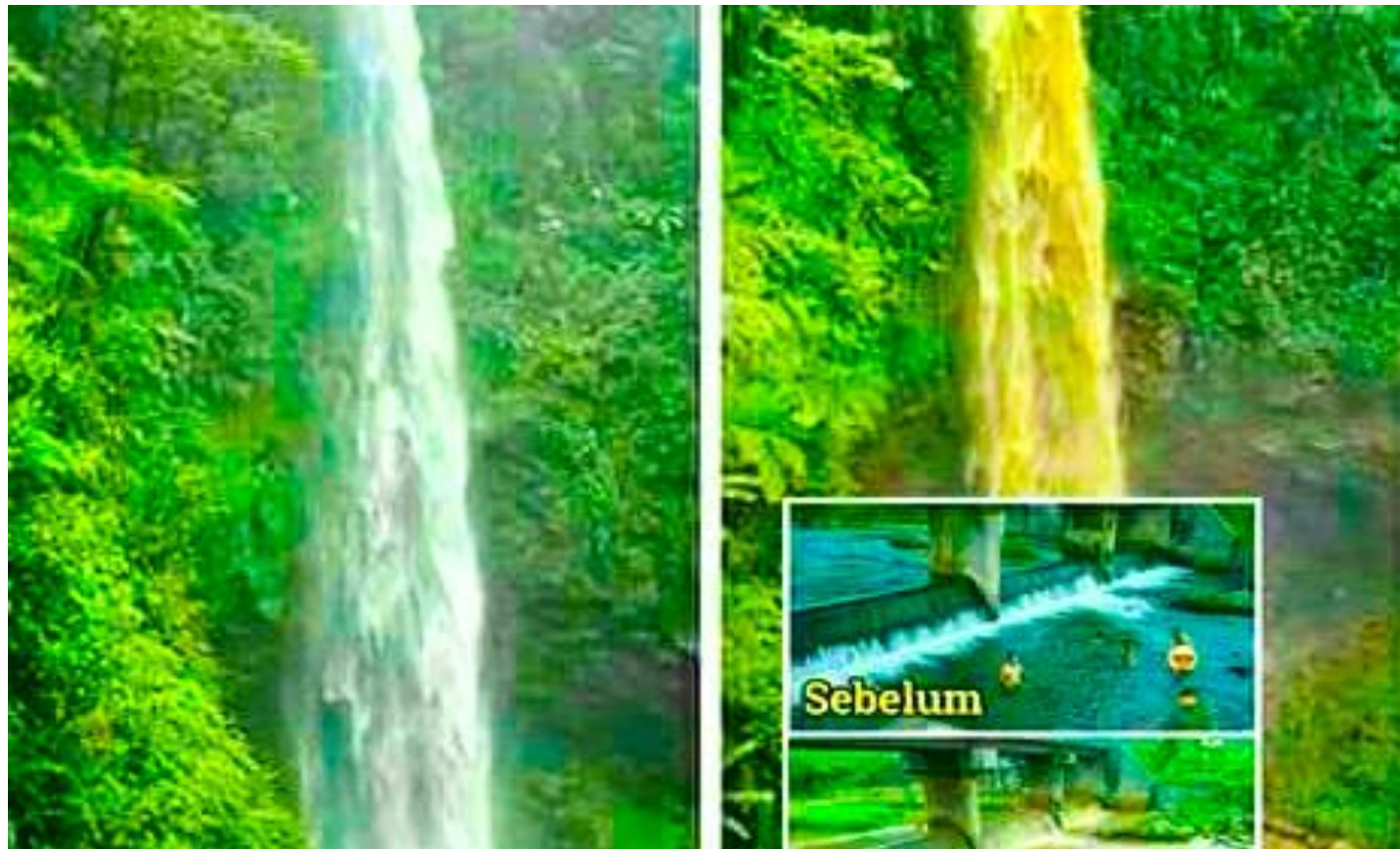


Gunung Slamet, gunung berapi tertinggi ke dua di pulau Jawa.

Sumber: http://www.merbabu.com/gunung/gunung_slamet.php



Polusi Lumpur masuk ke mata air dan sungai



Situasi sebelum dan sesudah kegiatan konstruksi infrastruktur (jalan, bangunan dan instalasi eksplorasi) dan pemboran untuk eksplorasi geothermal

Pada November 2016, air Sungai Prukut, sungai utama bagi masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Slamet, menjadi sangat kotor dan bercampur lumpur. Warga Panembangan dan Kalisari, tempat FPAR dilakukan, termasuk di antara masyarakat yang tidak bisa lagi menggunakan air dari mata air dan sungai. Warga pada awalnya tidak mengetahui penyebab lumpur tersebut.

Baru setelah menanyai aparat desa dan melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa perusahaan bernama PT Sejahtera Alam Energi (SAE) telah melakukan penebangan pohon untuk konstruksi infrastruktur dan pengeboran eksplorasi energi geothermal di lereng Gunung Slamet sejak Maret 2016.

Hingga mereka berhadapan dengan sungai berlumpur khususnya Sungai Prukut, warga tidak mengetahui informasi apa pun tentang proyek geothermal di wilayah mereka dan potensi dampak serta kerugiannya bagi kehidupan dan mata pencaharian mereka.

Selain mencemari mata air dan sungai, kegiatan pembangunan dan eksplorasi infrastruktur geothermal juga memicu hilangnya mata pencaharian masyarakat seperti matinya biota sungai akibat pencemaran lumpur, antara lain ikan, ulat sutera; hancurnya usaha-usaha rumahan termasuk pembibitan dan budidaya ikan serta budidaya ulat sutera. Apalagi industri rumah tangga tahu tidak bisa memproduksi sama sekali saat airnya keruh.

Mata pencaharian dan pendapatan masyarakat di Panembangan dan Kalisari mengalami penurunan drastis bahkan ada yang hancur. Banyak yang terpaksa beralih profesi antara lain menjadi pemelihara kambing, buruh pabrik, petani padi, tukang las, buruh bangunan, jualan mie ayam, jualan sampah, sopir, petani. Mengambil hutang dari rentenir menjadi kebiasaan ketika mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan.

Perempuan menanggung beban polusi lumpur

Menurunnya pendapatan warga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup mereka. Hal ini semakin menambah beban perempuan terutama karena mereka terpaksa mencari sumber air alternatif. Mereka harus mengambil air dari mata air lain yang lebih jauh, meminta air ke kerabat di desa lain, dan menampung air hujan. Bahkan ada yang terpaksa membeli air galon yang mahal, padahal tidak semua rumah tangga mampu membeli air galon.

Beban rumah tangga pada perempuan menjadi lebih berat. Ketika air keruh, selain melakukan pekerjaan rumah tangga, aktivitas sehari-hari mereka hanya dihabiskan untuk mengambil air. Untuk mengambil air di mata air yang jauh, mereka harus berjalan jauh -bisa sampai setengah jam bagi sebagian perempuan-, mengantre berjam-jam, dan hilir mudik membawa beban berat ember, atau galon air melalui jalur tanah yang curam, berbatu dan basah. Sebelum dan sesudah mengambil air mereka harus melakukan pekerjaan rumah tangga dan juga melakukan berbagai pekerjaan di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.



Perempuan harus mencari air di mata air yang jauh, pergi dan pulang melalui jalan terjal dan ricin dengan membawa beban berat ember dan tempat air bersih lainnya

Akibat berbagai dampak tersebut, warga menuntut penghentian proyek geothermal, serta menuntut PT.SAE dan pemerintah untuk menyediakan air bersih yang cukup. Tuntutan masyarakat ditanggapi. Pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan tangki air. Namun, air disediakan tidak mencukupi dan waktu pengisian tidak pasti. Perempuan harus menunggu lama, berebut air, atau bahkan tak jarang pulang dengan tangan kosong. Masyarakat juga menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat kegiatan konstruksi dan eksplorasi infrastruktur geothermal.

Apa yang perempuan inginkan....



Namun, proses ganti rugi dilakukan tidak secara terbuka dan tidak semua warga mengetahui atau menerima ganti rugi. Proses dan besaran ganti rugi yang tidak transparan menimbulkan kecemburuan dan saling curiga di antara warga. Ada juga desas-desus bahwa kompensasi yang lebih besar diberikan kepada mereka yang dekat dengan perangkat desa. Ketegangan pun muncul antara masyarakat dan aparat desa yang dianggap memihak PT. SAE.

Selama bulan Februari ke September 2020 perempuan dari 2 desa yang berpartisipasi dalam FPAR, mengkaji situasi mereka saat ini setelah masalah polusi lumpur di 2016-2017. Banyak keluarga masih belum bisa pulih dari kehilangan pendapatan terutama karena kekurangan modal. Debit air Sungai Prukut menjadi rendah sehingga tidak bisa lagi menjadi sumber ikan atau ulat sutera; beberapa industri rumah tangga tahu berjalan kembali tetapi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk air bersih; pendapatan yang lebih kecil dari kegiatan ekonomi alternatif, dan lainnya.

...
...
...
Menurut kami, untuk mengatasi masalah air keruh adalah dengan menghentikan pengoperasian proyek panas bumi", kata Rini, peserta FPAR dari Panembangan.

Kehidupan masyarakat khususnya kaum perempuan masih sulit. Salah satu solusi yang dipikirkan oleh perempuan adalah menghentikan proyek geothermal, sehingga pencemaran lumpur tidak akan terjadi lagi, dan air dapat kembali normal, berlimpah, bersih dan jernih sehingga dapat memulihkan mata pencaharian mereka yang hilang. Selain itu, mereka mengharapkan agar Pemerintah mempertimbangkan dengan seksama proyek-proyek yang ada, melakukan kajian yang komprehensif, dan menindak tegas para pelaku lingkungan yang telah mencemari air dan menghancurkan mata pencaharian masyarakat. Pengembangan proyek juga harus diinformasikan sejak awal agar masyarakat dapat bersiap menghadapi potensi dampak negatif yang akan menimpa mereka.

Akses masyarakat ke air dari Sungai Poso dikontrol oleh perusahaan PLTA

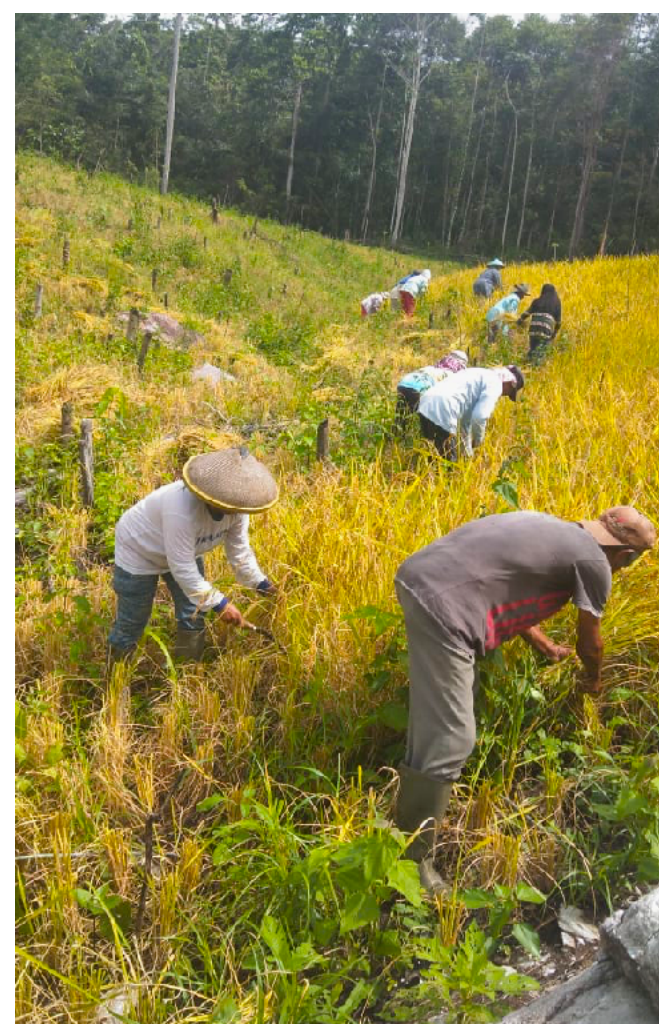
Informasi Proyek

Nama	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana atau juga dikenal dengan PLTA Poso
Lokasi	Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
Sumber daya	Air terjun Sulewana yang berhulu dari Danau Poso dan mengalir ke Sungai Poso
Pelaksana Proyek	PT. Poso Energy (anak perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama – Kalla Group)
Periode pembangunan	PLTA II sejak 2004, PLTA I dan III sejak 2016
Target Kapasitas	PLTA Poso – I sebesar 120 Mega Watt, Poso - II sebesar 195 Mega Watt dan Poso III sebesar 400 Mega Watt
Status Proyek	PLTA II telah beroperasi sejak 2012, PLTA I dan III dalam proses pembangunan

Mata pencaharian warga Sulewana, Poso

Masyarakat di 3 desa di Sulewana, Poso di Sulawesi Tengah, bekerja sebagai petani (padi, sayuran dan tanaman komersial lainnya) dan melakukan budidaya ikan di Danau Poso. Oleh karena itu, penghidupan mereka sangat bergantung pada Sungai Poso yang berasal dari Danau Poso. Apalagi, Sungai Poso merupakan sumber air mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat juga mengumpulkan hasil hutan dari hutan sekitar. Air terjun cantik di Sulawana ini menjadi tujuan wisata domestik. Banyak perempuan yang membuka lapak untuk menjual makanan, minuman, jajanan dan suvenir lainnya.

13 perempuan dari 3 desa Sulewana tersebut mengikuti Program Perempuan dan Energi FPAR untuk mendokumentasikan pengalaman mereka terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso.



Danau Poso, sumber mata air bagi sungai-sungai di Sulawesi Tengah

Sumber: <https://www.nativeindonesia.com/danau-poso/>

PLTA Poso terdiri dari 3 unit: Konstruksi Unit 2 di desa Sulewana sejak tahun 2004 dan sudah beroperasi; sedangkan Unit 1 di Desa Saojo dan Unit 3 di Desa Tampemadoro mulai dibangun sejak tahun 2016. Sejak saat itu kehidupan masyarakat di Desa Sulewana, Saojo dan Tampemadoro berubah. Meski masa pembangunan 3 unit tersebut beragam, namun permasalahan yang dihadapi masyarakat di tiga desa tersebut hampir sama.

Tidak ada keterbukaan informasi kepada masyarakat yang terkena dampak mengenai rencana pembangunan PLTA. Warga, termasuk perempuan, tidak pernah mendapat informasi yang jelas maupun dilakukan konsultasi dengan mereka, baik oleh perusahaan maupun pemerintah, tentang potensi dampak proyek PLTA. Masyarakat hanya mendengar secara lisan bahwa akan ada pembangunan proyek di daerahnya, pekerjaan akan ditawarkan dan masyarakat akan mendapat listrik gratis.

Proses pembebasan tanah tidak dilakukan melalui pembahasan dan kesepakatan harga tanah, namun dengan kekerasan dan intimidasi oleh perusahaan dan aparat desa.



Bendungan Poso Unit 2 di wilayah Sulewana

Harga tanah yang ditawarkan dan janji-janji perusahaan menimbulkan pro dan kontra terhadap perusahaan, menimbulkan perselisihan dan konflik dalam masyarakat, antara keluarga, kerabat dan tetangga. Masyarakat yang tidak lagi memiliki tanah untuk bercocok tanam dan berkebun karena perampasan tanah, terpaksa bekerja sebagai buruh tani di tanah orang lain.

Selain itu, selama proses pembangunan bendungan termasuk pengerukan Danau Poso, telah mempengaruhi danau dan membunuh ikan dan peternakan ikan.

Pemboman untuk menambang batu mencemari sungai dan merusak rumah-rumah



Pengeboman/peledakan yang dilakukan perusahaan untuk menghancurkan dan mengangkat bebatuan di bantaran Sungai Poso mencemari sungai sehingga menjadi keruh dan berwarna kecoklatan. Ledakan merusak rumah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai di Desa Sulewana. Air terjun Sulewana mengering dan hancur karena kegiatan konstruksi untuk membangun PLTA Sulewana Unit 2.

Perlawanan masyarakat muncul ketika perusahaan membongkar Jembatan Yondo Pamona di Desa Tampemadoro. Perusahaan juga menutup akses masyarakat ke sungai melalui pintu air yang mereka bangun. Perusahaan melarang masyarakat untuk menangkap ikan sidat (sejenis belut) di sungai sehingga masyarakat tidak lagi bebas beraktivitas di sepanjang sungai.

Di Desa Saojo, perusahaan memiliki juga menutup jalan di bantaran sungai dengan batu besar, sehingga warga hanya bisa berjalan kaki, tidak bisa menggunakan kendaraan, sedangkan kebun pertanian mereka cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Selain itu, hasil panen masyarakat Tampemadoro juga rusak akibat longsor yang dipicu oleh aktivitas pembangunan jalan perusahaan.

Masyarakat Sulewana juga merasakan dampak PLTA Poso Unit 2 yang beroperasi sejak 2012. Sejak PLTA mulai beroperasi, muncul isu pencemaran sungai akibat semen dan minyak yang dibuang dari turbin ke sungai.

Air dari sungai tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Namun, masyarakat terpaksa menggunakan air sungai yang kotor dan tercemar karena tidak mampu membeli air setiap hari untuk memasak, minum, mandi dan sebagainya. Pencemaran juga menyebabkan ikan-ikan budidaya di sungai mati. Meski perusahaan mengganti kerugian, namun warga desa dilarang melakukan budidaya ikan lagi. Aliran sungai kini dikendalikan melalui pintu air yang dibangun.

Apa yang diinginkan perempuan ...

Perempuan Desa Sulewana yang tinggal di bantaran sungai merasa tidak aman. Ketika perusahaan membuka pintu air, aliran sungai semakin tinggi, arus semakin kuat dan akan menggenangi tanah di sekitar bantaran sungai dekat rumah mereka. Aktivitas perusahaan seringkali menimbulkan getaran kuat seperti gempa bumi bila proyek mengalirkan listrik ke waduk pada saat terjadi pemadaman listrik singkat atau tiba-tiba. Getaran tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Saat ini, masyarakat, khususnya perempuan, semakin menderita karena berbagai masalah yang dipicu oleh pembangunan dan pengoperasian proyek tersebut. Perempuan di Desa Sulewana, Saojo dan Tampemadoro menyatakan akan terus memperjuangkan haknya. Mereka akan terus mengumpulkan informasi mengenai perusahaan dan dampak yang mereka hadapi. Mereka akan mengirimkan surat kepada Bupati Poso dan pemerintah untuk menginformasikan keadaan perempuan dan menuntut tindakan tegas terhadap perusahaan atas kerugian dan dampak yang mereka alami akibat kegiatan PLTA Poso Energy.

"Kita harus berani bicara untuk menyuarkan hak-hak kita ..." kata Ibu Erni



Perusahaan PLTA membangun jalan sepanjang sungai Poso dan melarang warga menggunakannya



Ladang angin di tengah kehidupan masyarakat

Informasi Proyek	
Nama	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo 1 Jenepono
Lokasi	Kabupaten Jenepono, Sulawesi Selatan (meliputi 3 kecamatan, yaitu Kec. Binamu, Kec. Turatea, dan Kecamatan Batang)
Luasan	100-120 Hektar
Pembiayaan	US\$160,7 juta atau setara dengan 2,2 Triliun
Sumber Pembiayaan	EQuis energy dari Singapura
Pelaksana Proyek	Konsorsium PT. Redaya Energy Pte, PT Global Pacific Energy dan PT PLN (Persero)
Periode Pembangunan	2016-2019
Target Kapasitas	72 Mega Watt (20 turbin, masing-masing 3,6 Mega Watt)
Status Proyek	Beroperasi sejak Mei 2019

Kehidupan warga Jeneponto

Desa Pa'rangang Beru merupakan salah satu lokasi pembangunan turbin angin, di tengah kehidupan masyarakat dan persawahan.

Mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani, dengan tanaman pangan antara lain beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan singkong. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada sumber air.

FPAR Perempuan dan Energi dilaksanakan di 3 desa, yaitu Desa Pa'rasangan Beru, Desa Langkura, dan Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. 9 perempuan dari 3 desa tersebut, yang kehilangan tanahnya selama pembangunan ladang angin, terlibat dalam program ini.



Pembelian tanah secara paksa



Sumber: <https://theinsiderstories.com/adb-prepares-us3b-to-support-indonesias-power-projects-until-2021/>



Sumber: <https://www.sulselsatu.com/2018/04/04/sulsel/selatan/syl-titip-pltb-tolo-1-pada-pln.html>

Dimulainya Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo sejak 2016 mengubah kehidupan perempuan di 3 desa Pa'rasangan Beru, Langkura, dan Bontomatene. Masyarakat terpaksa menjual sawahnya dengan harga yang sangat murah dan jauh di bawah harga pasar. Proses pembebasan lahan dilakukan oleh calo dengan janji pekerjaan dan listrik tidak akan padam lagi seperti yang sering mereka alami.

Warga yang tidak mau menjual tanahnya diintimidasi dan diancam, baik oleh calo maupun dengan dukungan polisi. Salah satu bentuk intimidasi yang sering terjadi melalui kunjungan malam, adalah ancaman bahwa nantinya tanah akan diambil alih oleh pemerintah tanpa ada ganti rugi. Warga lain mendapat ancaman bahwa anak-anak mereka yang bekerja sebagai PNS akan dilaporkan dan dipindahkan ke desa-desa terpencil lainnya.

Setelah proses pembebasan lahan, tidak ada lagi mata pencaharian alternatif yang dapat menggantikan pendapatan yang sama dari sawah bagi masyarakat. Bahkan setelah 3 tahun berlalu, masyarakat tidak pernah ditawari pekerjaan; selain itu, masyarakat masih mengalami pemadaman listrik minimal 3 kali dalam sebulan. Masyarakat menghadapi masa-masa sulit akibat ladang angin tersebut, khususnya kaum perempuan, karena mereka harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebelumnya mereka makan nasi dari sawah mereka sendiri, tetapi sekarang mereka harus membeli beras setiap hari.

Apa yang diinginkan perempuan? ...

Selain itu, penduduk desa di sekitar ladang angin merasa takut, terutama saat bekerja di sawah. Ketika baling-baling turbin berputar cepat dan menimbulkan suara keras, mereka takut baling-baling akan lepas, terbang dan menimpa mereka. Kekhawatiran lain yang dirasakan warga desa adalah berkurangnya curah hujan di wilayah mereka yang menyebabkan berkurangnya luas sawah dan cuaca panas yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan produksi pertanian menurun. Masyarakat beranggapan bahwa baling-baling turbin menghasilkan angin yang sangat kencang, sehingga proses awan untuk menghasilkan air hujan tidak terjadi.

Sementara itu, perempuan yang merasa kehidupannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kembali normal, berharap perusahaan ladang angin dapat memenuhi janjinya untuk bekerja agar anggota keluarganya dapat terbebas dari kesulitan. Selanjutnya, Pemerintah dan perusahaan ladang angin harus menjamin keselamatan petani di wilayah kerja ladang angin



Masyarakat khawatir terhadap kemungkinan perampasan tanah dan mata pencaharian oleh rencana pembangunan proyek geothermal

Informasi Proyek

Nama	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Simbolon Samosir
Lokasi	Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Luasan WKP	68.800 Hektar
SK Penetapan Wilayah Pertambangan	Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1827K/30/MM/2012 pada tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi di Daerah Simbolon Kabupaten Samosir
Pelaksana Proyek	PT. Optima Nusantara Energi (kemudian Bersama KS Orka asal China membentuk PT Samosir Geothermal Power)
Target Operasi	Tahun 2024
Kapasitas	110 Mega Watt
Status Proyek	Tahap Persiapan Proyek– per Tahun 2018 telah melakukan survey geologi, geofisika, geosains, dan pemetaan sosial di lokasi proyek.



Cantiknya Danau Toba di Sumatra Utara.

Sumber: <https://www.panorama-destination.com/indonesia/why-toba/>



Berkebun kopi merupakan salah satu mata pencaharian di Pulau Samosir.

Sumber: <https://www.sumatra-ecotravel.com/packages/lake-toba-batak-culture-coffee/>
#iLightbox[gallery_image_1]/3

Kehidupan masyarakat Pulau Samosir di Danau Toba

Danau Toba adalah sebuah danau alam besar di Sumatera Utara, menempati kaldera gunung berapi dengan sekitar 100 km dan lebar 30 km. Ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan diakui pada Juli 2020 sebagai salah satu Geopark Global UNESCO. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir. Danau dan pulau itu terbentuk setelah letusan gunung berapi sekitar 75.000 tahun lalu. Danau Toba dan Pulau Samosir adalah tujuan wisata terkenal Indonesia.

Mata pencaharian masyarakat adalah bercocok tanam padi, kopi, palawija, kacang-kacangan, nanas, ubi dan membuat batu bata. Umumnya mereka memiliki lahan sendiri untuk kegiatan pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun dalam 5 tahun terakhir, mereka menghadapi kesulitan dalam berladang karena cuaca ekstrem dan juga kekurangan air, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian.

Dalam soal kepemilikan tanah di desa ini, masih terjadi konflik tanah antara dua marga besar Samosir: Simbolon dan Marbun.

13 perempuan akar rumput dari Desa Sigaol Simbolon dan Desa Sigaol Marbun mengikuti Program Perempuan dan Energi FPAR. Kedua desa tersebut masuk dalam wilayah proyek rencana pengembangan Panas Bumi Simbolon.

Tidak ada informasi tentang rencana proyek

Warga Sigaol Simbolon dan Sigaol Marbun, termasuk para perempuan, tidak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap dari pemerintah daerah maupun pemilik proyek tentang rencana pengembangan proyek panas bumi. Masyarakat mengetahui rencana tersebut dari beberapa warga desa yang melihat petugas datang ke daerah dekat pertanian mereka untuk mensurvei daerah. Karenanya, mereka menduga di mana lokasi proyek panas bumi.

Karena kurangnya informasi tentang rencana pengembangan proyek panas bumi, terjadi ketegangan masalah tanah. Warga desa kemudian berebut tanah, baik dari marga yang berbeda dan tidak jarang dengan anggota keluarga dan kerabat lainnya.

Namun, beberapa warga, terutama perempuan, merasa tidak nyaman dengan rencana proyek tersebut. Mereka khawatir akan potensi konflik yang mungkin terjadi: antar masyarakat, antara masyarakat dan perusahaan, mengingat konflik kepemilikan tanah yang ada sedang berlangsung antara Marga Simbolon dan Marbun, belum juga terselesaikan.



Warga menduga bahwa di sinilah lokasi proyek geothermal tersebut



Apa yang diinginkan perempuan ...



“... Apabila proyek geothermal akan sama dengan Sarulla, saya menolak keras. Saya pernah ke Sarulla dan menyaksikan banyak warga digusur...” ujar Repinna Marbun



“... Saya pernah dengar tentang geothermal tetapi tidak tahu perusahaan apa itu dan apa yang akan dibangun. Sekarang masalah tanah sangat mencekam. Setiap orang berebut tanah, baik itu dari klan yang berbeda atau anggota keluarga lainnya. Tanah harus dilindungi agar tidak diambil oleh orang lain...” kata Tinori Pasaribu.

Dalam hal ini, perempuan di kedua desa tersebut menolak pengembangan proyek geothermal di desa mereka karena khawatir akan kehilangan tanah sebagai sumber mata pencaharian dan dampak negatif lainnya, terutama karena mereka telah mendengar dan bahkan melihat dampak negatifnya. proyek geothermal di tempat lain. Bahkan jika pemilik proyek atau pemerintah mungkin memberi mereka kompensasi, mereka tidak mau karena tanah bagi perempuan sangat berarti bagi generasi mendatang..

“... Saya rasa geothermal tidak perlu ada di desa kami karena listrik di Samosir sudah cukup. Pulau Samosir sangat kecil, jika dirusak oleh proyek, pulau tempat tinggal kami bisa tenggelam...” kata Rosintha Manik

Setelah 36 tahun masalah penggusuran tetap masih belum terselesaikan

Informasi Proyek

Nama	Pembangunan Waduk Kedung Ombo
Lokasi	Kabupaten Sragen, Boyolali dan Grobogan, Jawa Tengah
Luasan	6.576 Hektar (Perairan 2.830 Hektar, Lahan Daratan 3.746 Hektar)
Pembiayaan	283 juta USD
Sumber Pembiayaan	Pinjaman Bank Dunia sebesar US\$156 juta atau sekitar 55% (jangka waktu pinjaman 20 tahun), pinjaman Bank Exim Jepang sebesar USD 25,2 juta, dan sisanya APBN
Periode pembangunan	1985-1989
Rencana Pemanfaatan	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkekuatan 22,5 Mega Watt, irigasi, perikanan, pariwisata, pencegahan banjir, penampung air
Status Proyek	Mulai beroperasi sejak pada 14 Januari 1989 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto 18 Mei 1991

Kehidupan di tepi Waduk Kedung Ombo

FPAR Perempuan dan Energi dilaksanakan di Gunung Sono, Desa Gilirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Gunung Sono yang terletak paling dekat dengan Waduk Kedung Ombo, merupakan desa yang dibangun oleh masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat pembangunan Waduk Kedung Ombo pada tahun 1980-an. Desa ini sekarang dihuni oleh sekitar 200 keluarga. Saat ini mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, buruh tani (87%), peternak sapi dan nelayan.

Kondisi tanah di Gunung Sono adalah tanah keras, gersang, panas dan kurang subur, sehingga hanya tanaman tertentu saja yang dapat hidup, seperti singkong, jagung, kacang tanah, cabai, bayam, dan ubi jalar.

15 perempuan Gunung Sono peserta FPAR, berasal dari Desa Pilang Rembes yang terendam untuk proyek PLTA dan waduk



Bendungan Kedung Ombo

Sumber: <https://www.forda-mof.org/berita/post/2956>



perikanan tradisional

pengeringan jagung untuk dijual ke pasar



penggusuran ...



membanjiri desa-desa untuk memaksa warga pindah.

Sumber: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14672715.1994.10416178>

Pembangunan Waduk Kedung Ombo dilakukan tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat, baik dalam proses penggusuran maupun penentuan besaran ganti rugi. Masyarakat digusur dan diberikan ganti rugi yang nilainya tidak sesuai dengan luas tanah yang dirampas dan tidak cukup untuk membeli tanah baru. Warga desa yang memprotes mengalami kekerasan dari pihak militer sehingga menimbulkan trauma bagi perempuan.

Masyarakat mengungsi dan terpaksa mencari tempat tinggal baru atau pergi bertransmigrasi. Yang tinggal di daerah sekitar, bekerja sama menebangi hutan terdekat di wilayah Gunung Sono dan pindah ke sana hingga saat ini. Namun, setidaknya selama 5 tahun pertama masyarakat tidak bisa menanam sama sekali di tempat itu. Mereka harus membeli makanan atau meminta makanan di kebun warga lain, dan mereka sering makan nasi aking (nasi basi yang dijemur di bawah terik matahari lalu dikukus) untuk bertahan hidup.

Pembangunan PLTA dan waduk tersebut merusak mata air masyarakat dan juga tempat penampungan air yang digunakan untuk menampung air hujan. Kondisi Gunung Sono yang gersang dan minimnya air bersih semakin mempersulit kaum perempuan. Pada musim kemarau dan air di sumur menjadi kering, perempuan harus berjalan sekitar 12 kali bolak-balik dengan tempayan kecil (terutama perempuan tua tidak bisa membawa ember air besar) ke sumur lain yang masih memiliki air, melalui jalan rusak dan jalan berbatu. Sering kali mereka harus mengantri berjam-jam sampai giliran mengambil air.

kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, dan pemiskinan ...

Hilangnya pasar tradisional masyarakat untuk pembangunan PLTA, membuat warga desa kini harus menjual hasil pertaniannya di pasar yang jauh dari desanya. Pasar tua itu merupakan pusat kegiatan ekonomi perempuan sebelum proyek masuk. Perempuan sekarang tidak memiliki ruang sosial; berjalan jauh untuk menjual hasil pertanian dan untuk mengambil air, sehingga waktu untuk istirahat sangat terbatas. Selain bekerja untuk mencari uang, perempuan juga harus mengurus keluarga dan rumah tangganya, serta memastikan ketersediaan makanan dan air di rumah untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan kebutuhan lainnya.

Perjuangan masyarakat terdampak pembangunan PLTA Kedung Ombo masih berlanjut sampai sekarang. Masyarakat menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada pemerintah di tingkat daerah dan nasional melalui berbagai cara seperti aksi dan dialog. Namun, sejauh ini perjuangan gerakan ini masih didominasi kaum laki-laki. Ketidakikutsertaan perempuan dalam perjuangan ini mengakibatkan kepentingan dan permasalahan perempuan tidak tercakup dan tertangani.



Istirahat sebentar setelah melakukan kegiatan bertani dan mencari rumput untuk makanan hewan

Akses ke pelayanan publik dan pangan terbatas ...

Selain itu, warga sulit mengakses fasilitas umum karena letak desanya yang terpencil, biaya transportasi yang tidak terjangkau dan ketiadaan transportasi umum. Puskesmas terdekat memiliki fasilitas yang kurang memadai dan tenaga medis tidak selalu tersedia, namun warga desa masih harus berjalan jauh untuk mendapatkan pengobatan. Akibatnya, warga jarang memeriksakan kesehatannya, bahkan banyak perempuan hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya. Tidak tersedianya fasilitas pendidikan di Gunung Sono menyebabkan banyak anak putus sekolah. Anak perempuan dipaksa menikah muda atau dititipkan kepada orang lain. Akibatnya, banyak anak perempuan menikah di usia dini. Anak-anak yang melanjutkan sekolah harus menempuh berjalan jauh untuk ke sekolah.

... Saat air waduk naik dan membanjiri tanaman di tepi waduk, semua tanaman mati dan tidak bisa dipanen. Kami tidak berdaya. ” Ibu Riska

Meski kini perempuan mulai bercocok tanam di lahan bantaran waduk dengan menanam jagung, ubi kayu dan kacang tanah, kondisi waduk yang tidak menentu membuat lahan tidak bisa ditanami kapan saja. Selain itu, pendapatan dari bertani tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Biasanya ketika air di waduk pasang dan menggenangi tanaman mereka, perempuan harus mencari pekerjaan alternatif seperti buruh, penjual, atau menangkap ikan liar di waduk, atau kadang-kadang berhutang ke bank keliling atau rentenir.



saat air surut perempuan bercocok tanam (atas), tetapi tanaman bisa hancur jika terjadi air pasang (bawah)



Apa yang diinginkan perempuan ...

Perempuan Gunung Sono sangat berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, transportasi umum, dan pendidikan, termasuk beasiswa untuk anak-anak. Selain itu, perempuan juga berharap pemerintah memperhatikan peningkatan ekonomi perempuan, misalnya melalui pelatihan pengolahan ikan atau menjahit bagi perempuan yang tidak lagi memiliki lahan pertanian, program pengembangan penanaman sayuran, ketersediaan lahan pertanian dan pengembangan pupuk organik, serta pengembangan peternakan, termasuk pemanfaatan limbah ternak untuk dijadikan kompos atau bioga..



Peserta FPAR Perempuan dan Energi di Kedung Ombo

"... Selama ini tuntutan warga banyak tentang ganti rugi dan penyediaan lahan baru, sedangkan masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi perempuan belum termasuk dalam perjuangan yang masih dominasi laki-laki ..." Ibu Riska

"... .. Warga digusur paksa. Ganti rugi yang diberikan tidak cukup untuk membeli lahan baru." Ibu Sunarti



Melakukan kajian dan membuat kesimpulan



Kesimpulan

Pengalaman para perempuan tersebut dengan proyek-proyek energi yang datang ke kehidupan mereka, menunjukkan bahwa setiap proyek terutama dalam skala besar seperti geothermal, ladang angin atau bendungan akan mengubah lingkungan, mata pencaharian dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Masalah apa pun yang muncul karena intervensi ini, perempuan terutama yang menanggung bebannya.

Dalam kebanyakan kasus, proyek berskala besar datang dengan tekad untuk dibangun dengan biaya berapa pun. Agresi ini memicu perampasan tanah dan sumber daya, penggusuran, hilangnya mata pencaharian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemiskinan masyarakat. Arogansi proyek skala besar mengabaikan hak asasi manusia dan perempuan. Lebih buruk lagi, mereka menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan perempuan, dengan dukungan dari pemerintah atas nama proyek pembangunan vital nasional, atau dari lembaga keuangan atas nama ekonomi rendah karbon untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK).

Dorongan transformasi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon tidak terjadi dengan transformasi perilaku para pemilik kekuasaan di negara, lembaga keuangan, dan bisnis. Sebaliknya, bisnis berlangsung seperti biasa dengan dampak yang diperlihatkan oleh pengalaman perempuan dalam dokumentasi ini. Proyek energi bersih dan terbarukan merupakan proyek kotor dan merusak di mata masyarakat yang terkena dampak.

Transformasi ekonomi dan transisinya untuk mengurangi GRK dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim harus mengutamakan keberlanjutan mata pencaharian dan kehidupan masyarakat. Kebijakan dan pengalaman mereka harus menjadi dasar keputusan sehubungan dengan setiap intervensi proyek - baik itu untuk iklim, pembangunan atau investasi. Itulah yang perempuan inginkan.

Ringkasan Eksekutif ini berdasarkan testimoni lebih dari 50 perempuan dari 5 lokasi proyek energi di Indonesia.

Risma Umar, Marhaini Nasution dan Puspa Dewy melakukan kompilasi testimoni dari masing-masing lokasi

Aliza Yuliana menulis Ringkasan Eksekutif ini dan Titi Soentoro membuat ilustrasinya.

Penyumbang foto: Angela Manihuruk, Asrin Nua, Endang Dwijayanti, Ida Rustam, Indah & Citra, Marhaini Nasution, Nurlela, Sofianty, Titi Soentoro

November 2020



dengan dukungan dari

